



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 80-01-05-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **19:02** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Partai NasDem untuk Provinsi **Sumatera Utara**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Qodirun, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Minggu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **02:46** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 80-01-05-02/AP3-DPR-
DPRD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Partai NasDem
Kuasa Hukum : Qodirun, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 19:02 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon Tanggal 23 Maret 2024	4 rangkap	1 asli, 3 copy
2	KTA dan BAS	2 rangkap	2 copy
3	Surat Kuasa Pemohon Tanggal 22 Maret 2024	4 rangkap	1 asli, 3 copy
4	Daftar Alat Bukti Pemohon Tanggal 23 Maret 2024	2 rangkap	1 Asli, 1 Copy (P-1 s.d P-2549); P-273 tidak sesuai DAB; P-1693 tidak sesuai dengan Desa Turpuk Limbong TPS 001, P-1694 tidak sesuai dengan Desa Turpuk Limbong TPS 002, P-1695 tidak ada alat bukti; P-1395 tidak sesuai, ada bukti bernama Model C Desa Perkebunan Penigaratan 004 di P-804; di P-2013 bukti fisik tertulis TPS 006; DBP-2050 tidak ada; P-1089 terdapat bukti model C desa Teluk Binjai TPS 11; P-2247 s.d P-2285 dobel; bukti belum ada dengan nomor P-128, P-215, P-396, P-438, P-488, P-747, P-563 s.d. P-642, P-927, P-1152 s.d. P-1206.

5	Alat Bukti Pemohon Tanggal 23 Maret 2024	2 rangkap	1 Asli, 1 Copy (P-1 s.d P-2549); P-273 tidak sesuai DAB; P-1693 tidak sesuai dengan Desa TurpuK Limbong TPS 001, P-1694 tidak sesuai dengan Desa TurpuK Limbong TPS 002, P-1695 tidak ada alat bukti; P-1395 tidak sesuai, ada bukti bernama Model C Desa Perkebunan Penigarán 004 di P-804; di P-2013 bukti fisik tertulis TPS 006; DBP-2050 tidak ada; P-1089 terdapat bukti model C desa Teluk Binjai TPS 11; P-2247 s.d P-2285 dobel; bukti belum ada dengan nomor P-128, P-215, P-396, P-438, P-488, P-747, P-563 s.d. P-642, P-927, P-1152 s.d. P-1206.
6	Flashdisk	2 file Word	PENGANTAR BUKTI PHPU 2024 DPR DAPIL SUMUT II-FINAL dan Permohonan PHPU DPR Sumut II FINAL
7	2 Flashdisk P-2549	4 video	Pembukaan Kotak Suara di Pinggir Jalan di Nias Selatan, Pencoblosan Massal di Nias Selatan, Pencoblosan Massal oleh Penyelenggara, Pencoblosan Surat Suara sebelum hari H

Jakarta, 24 Maret 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id